PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, INVESTASI, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN RATA – RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

HERLIN OKTASARI

NIM B1012211003

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Herlin Oktasari
N I M	:	B1012211003
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal	:	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata – Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 20 Juni 2025



Herlin Oktasari
B1012211003

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Herlin Oktasari
NIM	:	B1012211003
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata – Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua w

Pontianak, 20 Juni 2025



Herlin Oktasari
B1012211003

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Herlin Oktasari
B10112211003

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 02 Juli 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP 198610022019031004	09/07/2025	
2.	Ketua Penguji	Fara Dina, S.E., M.E. NIP 198607302019032010	09/07/2025	
3.	Anggota Penguji	Faishol Luthfi, S.E., M.SEI. NIP 199307212022031012	09/07/2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

27 AUG 2025

Pontianak,
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	:	Herlin Oktasari
NIM	:	B1012211003
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.*

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Romi Suradi, SEI, ME NIP. 198610022019031004	4/6/2025	

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya penulisan Tugas Akhir yang berjudul "**Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata – Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat"** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu serta memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Sc.,Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas TanjungPura Pontianak.
4. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Fara Dina, S.E., M.E. selaku dosen penguji Pertama yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir.
6. Bapak Faishol Luthfi, S.E., M.SEI. selaku dosen penguji kedua yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekononi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Tanjung Pura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, PPAPK, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tanjung Pura Pontianak yang telah memberikan bekal

ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i.

9. Keluarga penulis terutama Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sardi dan Ibu Sarida yang telah memberi dukungan hangat secara moril, materil, doa, cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Semoga papa dan mama di beri kesehatan selalu dan di beri umur panjang, di berikan kebahagian dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus.
10. Adik penulis yang bernama Stiven, Samuel dan Ivana Amelia yang selalu mendukung dan memberi semangat.
11. Kepada seorang sahabat penulis yang bernama Stevi dengan NIM B1012211009 yang telah hadir sejak maba hingga akhir perkuliahan dalam tawa, air mata, susah, dan senang. Telah hadir di setiap keadaan dalam musim perkuliahan, tanpa pernah lelah atau pergi, mendengarkan tanpa menghakimi. Penulis sangat bersyukur atas berkat yang di kirim Tuhan dalam wijuid diri kamu, *we've been through a lot together and finally we did it!*
12. Untuk teman yang bernama Ridha dengan NIM B1012211007 yang telah memberikan support dan rela mengorbankan waktu dengan percuma untuk membantu dalam banyak hal di masa perkuliahan dan menyelsaikan tugas akhir.
13. Terimakasih untuk teman yang bernama Chelsi Rahayu Putri dengan NIM B1034211023 yang sudah ada sejak maba, terimakasih sudah mendengar keluh kesah tampa menghakimi dan sudah bekerja keras selama masa perkuliahan dan tugas akhir.
14. Dan terima kasih teruntuk teman-teman PPAPK kelas sore angkatan 2021terutama (Rizal Rizky Kuniawan, Noviendi Makalam, Ari Darusman, Vinsensius Jaja, Zulmi Ardian, Yolanda) dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberi semangat, menciptakan kenangan indah maupun buruk bersama selama masa perkuliahan, yang menjadikan setiap momen semakin berharga dan penuh makna.
15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena telah berani melangkah sejauh ini, mengambil keputusan-keputusan besar, dan tetap bertahan meski dalam banyak keterbatasan. Terima kasih karena telah menjalani dan menyelesaikan tanggung jawab besar sebagai seorang mahasiswa hingga akhirnya berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan segala upaya terbaik. Terima kasih telah terus mencoba dan tidak menyerah, walau terkadang diiringi air mata, keluhan, dan rasa lelah. Terima kasih

karena tetap setia pada prinsip “sulit bukan berarti tidak bisa,” dan terus melangkah meskipun jalannya tidak selalu mudah. Semoga segala perjuangan ini dapat memberikan rasa bangga di hati kedua orang tua yang selalu setia mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah hidup penulis. Perjalanan ini belum selesai, ini hanyalah awal dari cerita baru yang lebih panjang. Teruslah melangkah, teruslah bermimpi, dan jangan pernah ragu untuk berjuang kembali.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuh dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis meyakini bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terbuka terhadap kritik dan saran. Maka dari itu, masukan yang membangun sangat saya harapkan.

Pontianak, 20 Juni 2025

Herlin Oktasari
B1012211003

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK), investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap ketimpangan pendapatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2014–2023. Pendekatan metodologi yang dipergunakan ialah regresi data panel dengan Random Effect Model/REM. Temuan memperlihatkan bahwasanya variabel UMK dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan dalam kedua aspek tersebut dapat berkontribusi pada penurunan ketimpangan. Di sisi lain, variabel TPAK memperlihatkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sementara RLS memberikan pengaruh positif dan signifikan, yang memberi indikasi bahwasanya peningkatan rata-rata lama sekolah belum merata dan justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Secara simultan, keempat variabel tersebut terbukti berpengaruh positif dansignifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota; Investasi; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Rata-rata Lama Sekolah;Ketimpangan Pendapatan.

PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, INVESTASI, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN RATA – RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh: Herlin Oktasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi, karena mencerminkan ketidakseimbangan distribusi hasil pembangunan dan berpotensi menghambat pertumbuhan jangka panjang (Todaro & Smith, 2020). Masalah ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang terjadi secara global, baik di negara berkembang ataupun di negara maju (Istikharoh *et al*, 2020). Di Indonesia, World Bank (2015) menyoroti ketimpangan sebagai isu krusial akibat disparitas dalam akses pendidikan, pasar kerja, dan kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok masyarakat. Di Provinsi Kalimantan Barat fenomena ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu isu penting, meskipun perekonomian menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2023) menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan indeks Gini, seperti Kabupaten Melawi yang mencapai 0,392 pada tahun 2023, angka tersebut melebihi rata-rata nasional yang sebesar 0,388. Hal ini menandakan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan yang semakin memburuk.

2. Permasalahan

Secara teoritis peningkatan investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah dan rata-rata lama sekolah akan mengurangi ketimpangan, jika di lihat dari data yang ada di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukan bahwa investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum di kalbar menunjukan angka fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan pada 2023, namun data gini rasio juga mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2023.

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Rata – rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi pelaksanaan penelitian ini di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan data yang digunakan upah minimum kabupaten/kota, investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah dan rasio gini. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat statistik Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melakukan penelitian menggunakan data panel yakni kombinasi diantara data *time series* terhitung dari periode 2014-2023 beserta *cross-section* yang merupakan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa regresi data panel dan linier berganda melalui pengolahan data pada aplikasi Eviews 12. Uji data ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Kenaikan UMK terbukti mampu menurunkan tingkat ketimpangan karena meningkatkan pendapatan kelompok berupah rendah dan memperkuat daya beli masyarakat. Investasi juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan pendapatan antarwilayah. Masuknya modal ke sektor-sektor sindustri mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Dengan demikian, baik UMK maupun investasi dapat berkontribusi langsung terhadap perbaikan distribusi pendapatan di daerah.

Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan, menandakan bahwa peningkatan partisipasi kerja belum diimbangi oleh penyediaan pekerjaan yang merata dan berkualitas. Rata-rata lama sekolah (RLS) justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan belum merata dan cenderung dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu penyebab utama mengapa peningkatan RLS memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif menjadi langkah penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat, artinya peningkatan keduanya dapat menurunkan ketimpangan. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga tidak berdampak nyata terhadap ketimpangan. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan belum merata dan justru memperlebar kesenjangan. Secara simultan, keempat variabel dalam model hanya mampu menjelaskan 15,11%. variasi ketimpangan pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan standar upah dan mendorong pemerataan investasi guna menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Selain itu, perlu adanya kebijakan pemerataan akses pendidikan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dinikmati secara adil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kesempatan kerja, serta mempertimbangkan rentang waktu dan lokasi yang lebih luas guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR iii
LEMBAR YURIDIS ..... **Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR iv
UCAPAN TERIMAKASIH vi
ABSTRAK ix
RINGKASAN x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
ABSTRACT 1
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 1
2. KAJIAN LITERATUR 5
2.1 Ketimpangan Pendapatan 5
2.2 Teori Model Dua-Sektor Lewis 5
2.3 Teori Ekonomi Tenaga Kerja 6
2.4 Teori Human Capital 6
2.5 Kajian Empiris 6
2.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 7
2.7 Hipotesis Penelitian 7
3. METODE PENELITIAN 7
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 9
4.1 Hasil Penelitian 9
4.2 PEMBAHASAN 11
DAFTAR PUSTAKA 14
LAMPIRAN 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat 2019-2023 (Indeks) 2
Tabel 2 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2019-2023 (Rupiah)..... 3
Tabel 3 Jumlah Investasi di Kalimantan Barat 2029-2023 (Juta Rupiah) 3
Tabel 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Barat 2019-2023 (Persen)..... 4
Tabel 5 Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat 2019-2023 (Tahun) 4
Tabel 6 definisi operasional variabel 8
Tabel 7 Hasil Pemilihan Model 9
Tabel 8 Hasil Uji Multikolonieritas 9
Tabel 9 Hasil Uji Heterokedastisitas..... 9
Tabel 10 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kurva Lorenz 5

Gambar 2 Kerangka Konsep.....7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data yang diolah.....17
Lampiran 2 Uji Chow 20
Lampiran 3 Uji Hausman.....20
Lampiran 4 Uji LM.....20
Lampiran 5 Uji Multikolinearitas 21
Lampiran 6 Uji Heterokedastisitas.....21
Lampiran 7 Regresi Linier Berganda REM 22

PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, INVESTASI, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN RATA – RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Herlin Oktasari

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of the district/city minimum wage (UMK), investment, labor force participation rate (TPAK), and average years of schooling (RLS) on income inequality across 14 districts/cities in West Kalimantan Province during the 2014–2023 period. The methodological approach employed is panel data regression using the Random Effect Model (REM). The findings indicate that the UMK and investment variables have a negative and significant effect on income inequality, suggesting that increases in these two aspects can contribute to reducing inequality. On the other hand, the TPAK variable shows a positive but insignificant effect, while the RLS variable has a positive and significant effect, implying that the increase in average years of schooling has not been evenly distributed and may in fact exacerbate income disparities. Simultaneously, the four variables are found to have a significant overall influence on income inequality.

Keywords: *District/City Minimum Wage; Investment; Labor Force Participation Rate; Average Years of Schooling; Income Inequality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK), investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap ketimpangan pendapatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2014–2023. Pendekatan metodologi yang dipergunakan ialah regresi data panel dengan Random Effect Model/REM. Temuan memperlihatkan bahwasanya variabel UMK dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan dalam kedua aspek tersebut dapat berkontribusi pada penurunan ketimpangan. Di sisi lain, variabel TPAK memperlihatkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sementara RLS memberikan pengaruh positif dan signifikan, yang memberi indikasi bahwasanya peningkatan rata-rata lama sekolah belum merata dan justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Secara simultan, keempat variabel tersebut terbukti berpengaruh positif dansignifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota; Investasi; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Rata-rata Lama Sekolah;Ketimpangan Pendapatan.

1. PENDAHULUAN

Pemerataan hasil pembangunan ialah sebuah tujuan fundamental dalam proses pembangunan ekonomi. Suatu indikator utama yang dimanfaatkan menjadi pengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut adalah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi mencerminkan akses ekonomi yang tidak merata dan dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang.

b1012211003@student.untan.ac.id

Masalah ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang terjadi secara global, baik di negara berkembang ataupun di negara maju (Istikharoh *et al*, 2020). World Bank (2015) menyebutkan ketimpangan sebagai salah satu tantangan terbesar di Indonesia, akibat disparitas akses ke pendidikan, pasar tenaga kerja, kekayaan yang hanya dimiliki sebagian kecil orang, serta dampak krisis yang lebih berat bagi masyarakat miskin. Todaro dan Smith menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan adalah ketidakseimbangan distribusi pendapatan nasional, yang menciptakan kesenjangan antar kelompok masyarakat menjadi semakin terasa (Anshari *et al*., 2019).

Di Provinsi Kalimantan Barat, fenomena ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu isu penting, meskipun laju pertumbuhan ekonomi cenderung positif dalam beberapa tahun terakhir. Datapada tabel 1 memperlihatkan bahwasanya beberapa kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan indeks Gini pada 2023. Contohnya Kabupaten Sanggau yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 0,036 dengan indeks gini sebesar 0,321 pada tahun 2023 dan Kabupaten Melawi sebesar 0,035 dengan indeks gini sebesar 0,392, menjadikan Melawi sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat pada 2023bahkan melampaui rata-rata nasional yaitu 0,388 pada 2023. Hal ini menandakan bahwa ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan yang kian memburuk di wilayah tersebut.

Tabel 1 Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat 2019-2023 (Indeks)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	0,303	0,275	0,266	0,256	0,270
Bengkayang	0,309	0,274	0,263	0,303	0,337
Landak	0,271	0,293	0,310	0,288	0,265
Mempawah	0,292	0,273	0,283	0,302	0,291
Sanggau	0,309	0,279	0,330	0,285	0,321
Ketapang	0,290	0,290	0,261	0,266	0,279
Sintang	0,271	0,294	0,248	0,277	0,310
Kapuas Hulu	0,328	0,325	0,278	0,318	0,299
Sekadau	0,313	0,287	0,280	0,283	0,288
Melawi	0,323	0,348	0,300	0,357	0,392
Kayong Utara	0,321	0,322	0,294	0,280	0,312
Kubu Raya	0,295	0,290	0,297	0,294	0,289
Kota Pontianak	0,335	0,327	0,337	0,363	0,347
Kota Singkawang	0,292	0,286	0,319	0,291	0,274
Kalimantan Barat	0,327	0,317	0,313	0,314	0,321

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pemerintah menetapkan upah minimum untuk melindungi pekerja dari upah rendah dan memastikan kompensasi yang layak. Kebijakan upah minimum dianggap efektif dalam menekan ketimpangan pendapatan karena dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja yang bersifat kompetitif (Firdaus & Hasmarini, 2023). Upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata meningkat 8%, namun stagnan pada 2021 dan hanya naik 1% pada 2022 akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan produktivitas. Pada 2023, upah minimum kembali meningkat dengan rata-rata kenaikan 7%.

Tabel 2 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 2019-2023 (Rupiah)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	2.377.000	2.580.000	2.600.000	2.609.393	2.792.599
Bengkayang	2.364.777	2.566.019	2.566.019	2.586.291	2.767.564
Landak	2.349.870	2.549.844	2.549.844	2.582.000	2.767.310
Mempawah	2.232.600	2.422.594	2.422.594	2.437.279	2.606.472
Sanggau	2.318.000	2.515.262	2.515.262	2.547.405	2.703.536
Ketapang	2.636.000	2.860.323	2.860.323	2.876.252	3.085.615
Sintang	2.393.000	2.596.644	2.596.644	2.611.966	2.771.035
Kapuas Hulu	2.381.700	2.483.000	2.483.000	2.486.796	2.661.842
Sekadau	2.267.970	2.461.000	2.461.000	2.486.031	2.654.770
Melawi	2.288.306	2.483.040	2.483.040	2.515.896	2.703.536
Kayong Utara	2.501.850	2.714.750	2.714.750	2.748.507	2.930.678
Kubu Raya	2.242.000	2.433.000	2.433.000	2.467.630	2.646.878
Kota Pontianak	2.318.000	2.515.000	2.515.000	2.579.616	2.750.644
Kota Singkawang	2.338.840	2.537.875	2.537.875	2.596.120	2.781.898
Kalimantan Barat	2.211.500	2.399.698	2.399.698	2.434.328	2.608.601

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Di Indonesia, investasi mencakupi atas dua jenis: Investasi dari pemerintah berasalkan melalui akumulasi tabungan negara dan bantuan luar negeri, sementara investasi dari sektor swasta yakni Penanaman Modal Asing (PMA) beserta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Ningsih *et al*, 2020). Selama periode 2019 hingga 2023, investasi di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren yang terus meningkat, dari Rp7,703 triliun menjadi Rp15,015 triliun, dengan lonjakan tertinggi pada 2023. Mempawah dan Ketapang mencatat nilai investasi tertinggi pada tahun tersebut, sementara daerah seperti Melawi, Kayong Utara, dan Singkawang menerima investasi yang kecil dan tidak stabil. Investasi memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat mendorong peningkatan produksi dan menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan (Astary *et al*, 2024).

Tabel 3 Jumlah Investasi di Kalimantan Barat 2029-2023 (Juta Rupiah)

Kab/kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	400674,7026	339541,5924	241172,784	658386,6344	623258,2053
Bengkayang	318556,2031	915311,8883	405808,4819	57114,13373	1773411,082
Landak	176285,6353	122877,8035	479956,6284	1135936,305	1664780,124
Mempawah	378576,3486	4478604,747	5265513,812	503849,5201	5052842,418
Sanggau	948472,3447	324331,7966	301188,8943	1400281,383	995116,6347
Ketapang	776162,2454	837359,9341	1486049,844	140569,9644	3282837,36
Sintang	2191267,901	449873	499789,0692	936080,741	1532013,693
Kapuas Hulu	464386	930531,9371	452805,9058	2387857,054	205170,8134
Sekadau	556382,0695	207787,3913	244808,5708	894802,7102	178668,9518
Melawi	575604,3501	45425,87379	33655,5227	9600387,543	101444,4846
Kayong Utara	120593	9884,00	157551,0867	330549,7	227431,3
Kubu Raya	743688,4719	452635,4452	961347,7678	252206,2434	1039503,47
Kota Pontianak	51417,56599	161957,8528	148930,1837	47697,97236	761275,5004
Kota Singkawang	1170	941,1593865	101426,8996	629164,1	99648,4
Kalimantan Barat	7703236,839	9267180,422	10780005,45	9691837,379	15015968,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari sisi partisipasi angkatan kerja (TPAK), sempat turun 0,38% pada 2021, namun kembali naik sebesar 0,52% pada 2022 dan 0,45% pada 2023. Di tingkat kabupaten/kota, TPAK mengalami fluktuasi.

Beberapa daerah seperti Mempawah dan Ketapang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 4,96% dan 5,91%, sementara Kapuas Hulu justru turun 5,40% pada 2023. Pendidikan yang lebih tinggi memudahkan individu dalam memiliki pekerjaan yang layak sekaligus penghasilan yang tergolong lebih tinggi, sehingga berkontribusi dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (Hindun *et al*., 2019).

Tabel 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Barat 2019-2023 (Persen)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	71,76	74,28	72,84	74,12	72,72
Bengkayang	73,47	75,81	70,16	69,95	72,93
Landak	68,74	71,78	70,19	72,29	71,13
Mempawah	63,12	64,14	60,86	63,31	68,27
Sanggau	69,18	70,38	69,41	70,27	70,31
Ketapang	65,53	60,75	64,44	60,57	66,48
Sintang	72,01	75,57	77,78	73,14	74,12
Kapuas Hulu	77,22	74,09	72,35	77,68	72,28
Sekadau	77,38	77,53	71,98	74,31	73,77
Melawi	74,57	73,93	72,31	74,41	73,73
Kayong Utara	66,43	65,53	65,53	70,02	72,54
Kubu Raya	64,86	67,71	67,47	64,66	65,28
Kota Pontianak	61,75	60,05	61,94	64,82	63,47
Kota Singkawang	67,04	63,84	64,31	68,86	66,60
Kalimantan Barat	68,51	68,83	68,45	68,97	69,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) di Kalimantan Barat juga menemui kenaikan dari 7,31 tahun pada 2019 menyentuh angka 7,71 tahun pada 2023. Kota Pontianak mencatatkan angka tertinggi, yakni 10,45 tahun, sedangkan Kayong Utara mencatatkan angka terendah, yaitu 6,35 tahun. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran fundamental dalam memengaruhi besaran upah yang diterima individu, sehingga menjadi faktor signifikan dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian pendapatan di masyarakat (Nadya & Syafri, 2019).

Tabel 5 Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat 2019-2023 (Tahun)

Kab/Kota	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Sambas	6,70	6,71	6,72	6,74	6,75
Bengkayang	6,53	6,76	6,80	7,00	7,22
Landak	7,10	7,11	7,12	7,15	7,24
Mempawah	6,82	7,03	7,04	7,17	7,20
Sanggau	6,95	7,15	7,39	7,41	7,44
Ketapang	7,26	7,31	7,46	7,48	7,55
Sintang	6,89	7,07	7,08	7,36	7,64
Kapuas Hulu	7,47	7,52	7,53	7,59	7,82
Sekadau	6,60	6,83	6,85	7,12	7,13
Melawi	6,67	6,76	6,91	7,18	7,42
Kayong Utara	6,00	6,01	6,02	6,21	6,35
Kubu Raya	6,82	6,83	7,00	7,02	7,04
Kota Pontianak	10,14	10,17	10,43	10,44	10,45
Kota Singkawang	7,72	7,89	7,9	8,19	8,21
Kalimantan Barat	7,31	7,37	7,45	7,59	7,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Namun, peningkatan beberapa indikator di Kalimantan Barat, seperti upah minimum, investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rata-rata lama sekolah, tidak serta-merta diikuti oleh penurunan

ketimpangan pendapatan. Misalnya, meskipun UMK, investasi, dan rata-rata lama sekolah meningkat pada tahun 2023, indeks Gini juga menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan meningkat di beberapa daerah. Demikian pula, penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja di sejumlah kabupaten/kota tidak diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan pada 2023.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan:

1. Apakah UMK berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat?
3. Apakah TPAK berpengaruh pada ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat?
4. Apakah RLS berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat?

Penelitian ini bertujuannya untuk menganalisis pengaruh UMK, Investasi, TPAK, dan RLS terhadap ketimpangan pendapatan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2019–2023. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat dan menjadi dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya. Secara praktis, hasilnya dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.